

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan secara universal dapat dipahami sebagai upaya pengembangan potensi kemanusiaan secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan hidup dan kehidupan secara layak (Trianto, 2016). Pendidikan adalah salah satu alat yang paling efektif dalam mencapai tujuan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus melayani semua potensi yang ada pada anak didik dan juga mengembangkan berbagai aspek kepribadian anak sedini mungkin. Menurut Mansur (2015) pendidikan berarti pengembangan potensi yang terpendam, artinya setiap individu mempunyai potensi tersendiri yang perlu digali sedini mungkin. Kemakmuran atau kemajuan seorang tergantung pada keberhasilan pendidikan dalam mengelola potensi dalam diri anak. Tanpa pendidikan, potensi anak menjadi tidak berkembang dengan baik dan akan sia-sia.

Utami (2019) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku terhadap anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengembangkan bakat-bakatnya seoptimal mungkin, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan menjadi hal yang penting untuk diselenggarakan sejak usia dini untuk kesejahteraan hidup manusia di masa yang akan datang. Mulyasa (2017) menyatakan bahwa di tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan dasar yang cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap atau

perilaku anak sepanjang hidupnya. Pentingnya pendidikan untuk anak usia dini mendorong pemerintah menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pembinaan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya (Sujiono, 2013).

Penyelenggaraan pendidikan usia dini harus diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan anak yaitu pendidikan yang berdasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga yang mendukung adanya sistem sosial pertemanan untuk bermain permainan tradisional. Pengembangan kurikulum dengan menambahkan Tema Kearifan Lokal dapat dilakukan pada seluruh lembaga PAUD agar negara kita tidak mengalami krisis kepunahan permainan tradisional (Wulansari, 2017). Menurut Ariyanti (2018) setiap anak lahir dengan bakat, potensi, kemampuan, talenta, serta sikap dan sifat yang berbeda, sehingga potensi anak sangat beragam. Potensi dapat berupa perkembangan di bidang taraf dan intelegensi, ekonomi, sosial, psikologis, budaya, serta alam biologis yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut diperlukan peran pendidik untuk memfasilitasi aktivitas anak dengan material yang beragam. Peran pendidik dalam hal ini tidak hanya terbatas untuk memberikan pembelajaran kepada anak usia dini tetapi juga sebagai orang tua yang membimbing dan membentuk karakter seorang anak (Conny, 2018).

Pembelajaran pada anak usia dini adalah hasil dari interaksi antara pemikiran anak dan pengalamannya dengan materi-materi, ide-ide, dan orang-orang di sekitarnya. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya

untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak (Yuliani, 2019).

Salah satu paya pembinaan terhadap pendidikan anak usia dini diperlukan adanya sebuah kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi anak usia dini yang berlaku secara nasional. Menurut Suryadi (2015) Kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi adalah rambu-rambu yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum dan silabus (rencana pembelajaran) pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan terjadi pada usia 3-6 tahun yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan intelektual, dan perkembangan sosial. Kurikulum PAUD harus mengacu pada penggalian potensi kecerdasan yang dimiliki anak, sehingga peran guru hanya untuk mengembangkan, menyalurkan, dan mengarahkannya.

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai lembaga pemerintah yang menentukan arah pendidikan dan kurikulum untuk seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah dasar atau pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di sekolah (Angga, 2022). Kurikulum dalam pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Selain berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, kurikulum juga dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Fadhillah (2014) menyebutkan bahwa: *“A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum.”*. Artinya kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran yang memuat berbagai petunjuk belajar serta hasil yang diharapkan. Melalui kurikulum

berbagai program yang ditetapkan satuan pendidikan dapat dijalankan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Artinya, kurikulum menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan pendidikan dan merupakan ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Terdapat dua aspek penting yang harus dipahami, yaitu isi kurikulum dan proses implementasi kurikulum. Komponen pokok yang terkandung dalam kurikulum meliputi tujuan, isi atau materi yang diajarkan, strategi dan evaluasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana serta pengaturan terkait tujuan, isi, ataupun bahan pelajaran dan teknik yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah gagasan utama jalannya proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan pergantian kurikulum adalah sesuatu yang biasa terutama yang dirasakan oleh pendidik yang menjadi pusat dalam penerapan kurikulum tersebut. Kurikulum membutuhkan keterlibatan yang kritis sehingga mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dalam menjalankan kurikulum diperlukan manajemen kurikulum dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang membuat program pendidikan berjalan dengan sukses, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di sinilah pentingnya manajemen kurikulum profesional agar PAUD berhasil secara maksimal. Manajemen kurikulum sebagai pendekatan pengembangan sumber daya manusia kompetitif, sarana pembaharuan sosial yang berkeadilan, serta pembaharuan dunia pendidikan yang kontekstual sangat penting bagi eksistensi lembaga pendidikan. Oleh karena adanya lembaga pendidikan anak usia dini maka perlu adanya juga ilmu manajemen kurikulum yang baik agar keberadaan tetap eksis ditengah-tengah masyarakat. Dengan manajemen yang baik maka kurikulum yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik pula (Angga, 2022).

Langkah yang dilakukan Kemendikbudristek yaitu melakukan perubahan kurikulum yang diharapkan mampu memberikan inovasi dalam

pembelajaran (Fitriyah & Wardani, 2022). Perubahan kurikulum diharapkan mampu mencetak generasi yang milenial sehingga mampu memahami ilmu atau materi yang diajarkan secara cepat dan tepat (Jannah, 2023). Perubahan kurikulum berdampak positif dan negatif untuk kualitas pendidikan. Dampak positif yang muncul yaitu siswa atau anak dapat belajar mengikuti perbedaan zaman dan perkembangan teknologi yang didukung oleh kepala sekolah, guru, anak atau siswa lainnya, serta lembaga pendidikan. Peserta didik akan lebih aktif, terutama apabila dihadapkan dengan masalah langsung. Pemahaman mendalam terkait permasalahan yang ada, fokus pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, dan dukungan dari tenaga pendidik akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan yang ada khususnya dalam penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka akan memberikan dampak positif terhadap pembelajaran karena dengan penerapan kurikulum merdeka pembelajaran dalam kelas akan lebih hidup dan memberikan pemahaman mendalam terhadap hal yang sedang dibahas.

Dampak negatif adanya perubahan kurikulum yaitu siswa atau anak tidak mampu secara cepat beradaptasi dengan perubahan sistem pembelajaran kurikulum baru dan mengakibatkan kualitas pendidikan yang kurang baik atau buruk. Selain itu dampak negatif lainnya yaitu siswa menjadi malas belajar karena didorong untuk mencari pengetahuan sendiri, bukan diberi materi pembelajaran oleh tenaga pendidik. Menurut Angga (2022). Proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka memberikan tantangan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa. Selain itu, juga mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya.

Kurikulum dalam bahan ajar merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Selain itu reformasi kurikulum pendidikan yang sudah diadakan pembaharuan ditinjau dari kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), dan 2013 juga tidak membawa dampak positif terhadap perkembangan mutu di dunia pendidikan, sehingga sampai saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan hal tersebut adanya perubahan kurikulum yang sudah dilakukan pemerintah belum banyak membawa dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan (Angga, 2022).

Kemendikbudristek memberikan kebijakan baru mengenai penggunaan kurikulum yang bisa digunakan dalam satuan pendidikan yaitu Kurikulum Merdeka (Maulida, 2022). Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tenaga pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka lebih relevan serta interaktif yang memberikan kesempatan peserta didik aktif mengeksplorasi secara aktual dan mendukung pengembangan karakter.

Kurikulum merdeka mulai berjalan pada tahun 2022 pasca pandemi covid-19. Kurikulum baru diterapkan di beberapa sekolah dan terdapat sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih sederhana dan berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik. Selain itu, anak juga dibebaskan untuk memilih sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Kurikulum merdeka menjadi gagasan dalam transformasi bidang pendidikan Indonesia

sehingga mampu membentuk generasi unggul di masa depan (Angga dkk., 2022). Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dilaksanakan dengan cara mengembangkan profil anak atau siswa sehingga memiliki jiwa dan nilai yang sesuai dengan kandungan lima sila Pancasila serta dapat dasar atau bekal dalam kehidupannya.

Kurikulum merdeka sangat mengutamakan kebutuhan dan minat anak atau siswa sehingga dapat menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum merdeka dibuat dengan struktur kurikulum kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Cakupan dimensi yang tertuang dalam Kurikulum merdeka antara lain yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beriman, mandiri, berkebinekaan global, bergotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis (Jannah, 2023). Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan Kurikulum merdeka lebih diarahkan pada kebutuhan anak atau siswa.

Kebijakan merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Kebijakan merdeka belajar tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan, paling tidak ada tiga alasan yang mendukungnya. Pertama, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Kedua, ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut menunjukkan peserta didik masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Ketiga, kebijakan merdeka belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat (fleksibel) diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi,

tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antarsekolah (Khoirurrijal, 2022).

Berikut merupakan daftar PAUD di Kabupaten Ponorogo tahun 2023:

Jumlah lembaga pendidikan PAUD di Kabupaten Ponorogo 2023 sebanyak 1.024 yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Terdapat beberapa jenis PAUD yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu TK sebanyak 731, BA sebanyak 277, TPA sebanyak 8, dan SPS sebanyak 8. Namun, jumlah PAUD yang sudah menerapkan program kurikulum merdeka masih 30% dari jumlah keseluruhan PAUD di Kabupaten Ponorogo yaitu sebanyak 307. Terdapat 3 TK yang dipilih untuk menjadi objek dalam penelitian ini yaitu TK Banyudono, TK Pembina dan TK Mutiara Hati.

Fenomena yang terjadi di TK Banyudono, TK Pembina dan TK Mutiara Hati terkait adanya perubahan kurikulum pada lembaga pendidikan khususnya PAUD adalah minimnya tenaga pendidik dan peserta didik terkait inovasi dan kreativitas dalam pengembangan metode serta model pembelajaran yang tepat dalam penerapan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum membuat pendidik hingga anak-anak menjadi bahan percobaan untuk mendapatkan kurikulum yang berkualitas. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum terbaru seperti yang diharapkan Kemendikbudristek.

Permasalahan lainnya yang terjadi adalah kurangnya pengalaman pendidik dalam mengajar kurikulum merdeka dan kurangnya akses dalam pembelajaran. Hal ini berarti tenaga pendidik memiliki kesenjangan digital dan koneksi internet yang tidak merata, sehingga menjadi permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran mandiri khususnya online. Selain itu tenaga pendidik membutuhkan manajemen waktu yang lebih banyak waktu untuk belajar kembali serta menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.



Berdasarkan uraian permasalahan, maka solusi untuk menganalisis kurikulum merdeka dengan harapan peneliti dapat memberikan saran terkait, yang pertama arah kebijakan kurikulum pendidikan anak usia dini kedepannya. Maksudnya kurikulum dapat dijadikan petunjuk bagi pendidik dalam mengintegrasikan proses pendidikan. Solusi kedua yaitu perangkat ajar yang praktis, maksudnya berbagai materi yang dapat digunakan pendidik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah. Perangkat ajar dapat berupa bahan ajar, modul, ataupun buku. Dan solusi yang terakhir yaitu evaluasi anak yang praktis. Maksud dari evaluasi yang praktis ialah pendidik dapat menggunakan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran PAUD seperti komprehensif yang mencakup semua aspek yang dinilai, dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan, proses evaluasi dilakukan secara kooperatif, penafsiran terhadap sesuatu yang dinilai harus ada tanpa dibuat-buat, dan tentunya praktis supaya tidak memakan biaya, waktu ataupun tenaga yang banyak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Perbandingan Implementasi Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka Untuk Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Ponorogo”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka untuk PAUD di Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka untuk PAUD di Kabupaten Ponorogo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti mengemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan yang ingin meneliti terkait perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh gambaran pembahasan mengenai perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan masukan mengenai perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka sehingga kedepannya dapat memperbaiki pelaksanaan kurikulum merdeka.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti selanjutnya mengenai perbandingan implementasi pelaksanaan program kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo.

